



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Lailatul Khafiza¹⁾, Subadriyah²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama ^{1) 2)}
141120001368@unisnu.ac.id¹⁾ subadriyah@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

Based on Permendagri No. 13 of 2006 effectiveness is defined as the achievement of program results with predetermined targets, namely by comparing expenditures with results. Effectiveness is the success of an organization in achieving the planned goals. This study aims to determine the factors that influence the effectiveness of regional financial management. The factors studied include three independent variables, namely the government's internal control system, the competence of human resources, and the regional financial accounting system. The data used is primary data. Data was collected by distributing questionnaires to the head of the finance department and staff in the finance department at the OPD Jepara Regency, totaling 41 OPD. So that the total questionnaires distributed were 82 questionnaires. The sampling technique was done by simple random sampling. The method of analysis used multiple linear regression analysis. The results showed that (a) SPIP had a significant positive effect on the effectiveness of regional financial management, (b) SAKD had a significant positive effect on the effectiveness of regional financial management, (c) HR competence had a significant positive effect on the effectiveness of regional financial management, and (d) simultaneously SPIP, SAKD and HR competencies affect the effectiveness of regional financial management
Keywords: Effectiveness of regional financial management, HR competence, SAKD, SPIP.

Abstrak

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 efektivitas diartikan sebagai pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor-faktor yang diteliti meliputi tiga variabel independen yaitu sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Data yang digunakan yaitu data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada kepala bagian keuangan dan staff pada bagian keuangan di OPD Kabupaten Jepara yang berjumlah 41 OPD. Sehingga total kuesioner yang dibagikan yaitu 82 kuesioner. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, (b) SAKD berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, (c) kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan (d) secara simultan SPIP, SAKD dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
Kata Kunci: Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM, SAKD, SPIP.

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan reformasi mengenai pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab. Dengan diterapkannya undang-undang No.23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang merubah pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui DPRD maka pemerintah daerah harus melaksanakan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah ini memungkinkan setiap daerah untuk menjadi lebih aktif dan mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan, poin penting dalam penerapan otonomi daerah adalah proses pengelolaan keuangan yang bersifat efektif dan efisien guna mencapai visi dan misi daerah (Wijaya, 2017). Proses pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah yang terdapat dalam suatu instansi harus dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Pengelolaan keuangan daerah ini dapat dikatakan efektif jika tujuan yang direncanakan dapat dicapai dan telah terpenuhi dengan mencakup lima prinsip pengelolaan keuangan daerah. Lima prinsip tersebut yaitu akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, serta pengendalian.

Salah satu bentuk dari prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang dihasilkan berupa bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas dari pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari LKPD yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK menyajikan opini dari LKPD dan memuat berbagai macam temuan-temuan yang memuat permasalahan.

Efektivitas pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan sebuah sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas dari pengelolaan keuangan daerah tersebut yang berupa sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 menjelaskan bahwa agar tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel, pimpinan organisasi wajib melakukan pengendalian atas terselenggaranya kegiatan dalam pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang ada. Sistem pengendalian intern pemerintah mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan (Wijaya, 2017).

Selain SPIP, dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga dibutuhkan aparatur pemerintah/sumber daya manusia. Beberapa masalah dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan dikarenakan pemerintah daerah masih belum melaksanakan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan dengan baik, maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan yang berkompeten atau berkualitas dibidang keuangan (Bulan et al., 2017). Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Yaswat (2015) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia ini harus didukung dengan adanya pengalaman, pelatihan, dan latar belakang pendidikan yang baik agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola secara efektif.

Pemerintah daerah dalam mengelola dana publik harus mampu untuk menyediakan informasi laporan pertanggungjawaban secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut memiliki sistem yang memadai guna menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka untuk memantapkan otonomi daerah serta penerapan sistem desentralisasi hendaknya pemerintah daerah sudah melakukan pengembangan terhadap sistem informasi akuntansi.

Menurut Pradita (2010) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian dari prosedur yang saling terhubung disusun sesuai dengan skema secara menyeluruh yang ditujukan untuk dapat menghasilkan informasi dalam format laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun pihak eksternal dari pemerintah daerah. Proses akuntansi tersebut dilakukan secara manual maupun secara komputerisasi dalam bentuk jurnal serta buku besar. Apabila diperlukan maka dapat juga ditambah buku besar pembantu. SAKD ini jelas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah secara lebih optimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pradita (2010) meneliti pengaruh SAKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Ciamis, penelitian dari Wijaya (2017) tentang pengaruh SPIP pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah studi BPKAD Provinsi Lampung, dan penelitian dari Tanzerina (2017) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi SDM dan SAKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dengan pengaruh SPIP sebagai variabel moderating. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pertama, dengan objek dan lingkungan yang berbeda dimungkinkan menunjukkan hasil yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan metode analisis data yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang diharapkan agar mendapatkan hasil analisis data yang maksimal. Ketiga, penelitian ini melihat pengaruh dari kompetensi SDM dan SAKD secara langsung pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanzerina (2017) menggunakan SPIP sebagai variabel moderating. Keempat, penelitian ini menggabungkan seluruh variabel yang dilakukan oleh (Pradita, 2010; Tanzerina, 2017; Wijaya, 2017) untuk melihat pengaruhnya secara langsung terhadap efektivitas dari pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada Dinas atau Instansi di Kabupaten Jepara. Dilakukan pada Kabupaten Jepara karena memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Memiliki predikat yang membanggakan dengan mendapat penilaian WTP dari BPK selama 6 tahun berturut-turut. Namun dengan prestasi tersebut belum diimbangi dengan optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan serta sasaran organisasi. Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah yang masih ditemukan dengan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini terbukti dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Tahun 2017 bahwa dari 162 LKPD yang belum memperoleh opini WTP umumnya karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan daerah yang disajikan tidak sesuai dengan SAP. Sejak dimulainya penyusunan LKPD pada Tahun 2015, seluruh pemda diwajibkan untuk dapat menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kenaikan opini dari tahun 2015 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada pemerintah provinsi, opini WTP bertambah dari 29 LKPD (85%) menjadi 31 LKPD (91%). Begitu pula untuk pemerintah kabupaten yang bertambah dari 224 LKPD (54%) menjadi 272 LKPD (66%), dan pada pemerintah kota dari 60 LKPD (65%) menjadi 72 LKPD (78%). Kenaikan opini dari TW/ TMP/ WDP menjadi WTP pada 84 LKPD dan dari TW/ TMP menjadi WDP pada 15 LKPD dikarenakan pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan atas kelemahan dari sistem pengendalian internal pemerintah maupun ketidakpatuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah" Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan daerah menurut PP RI No 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara/daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya yaitu segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD. APBD merupakan rancangan kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan berupa bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban sebagai target maksimal dalam suatu periode anggaran (Halim & Syam, 2013). Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa tahapan, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan.

Permendagri No.13 tahun 2006 mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian dari suatu hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil yang dicapai. Efektivitas tidak menyatakan berapa besar suatu biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan organisasi tetapi melihat apakah dari suatu program telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan (Pradita, 2010). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, menurut Halim & Syam (2013) merupakan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif apabila sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu : Akuntabilitas, *Value for money*, Kejujuran, Transparansi dan Pengendalian.

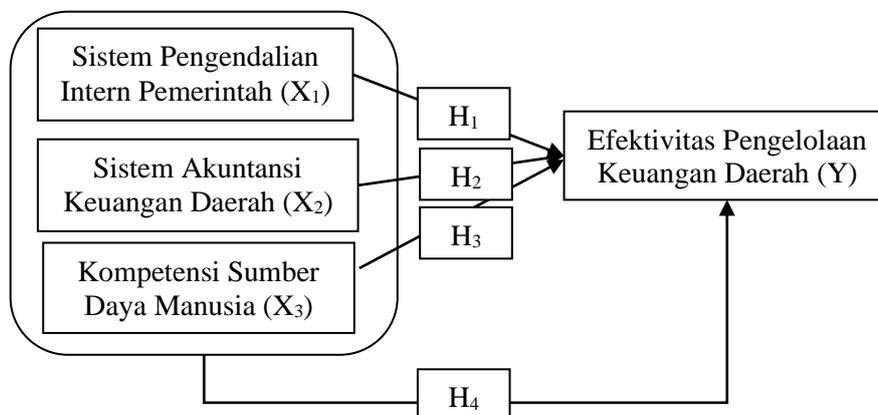
Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2011). Instansi pemerintah harus memiliki pengendalian internal yang baik, hal ini dilakukan untuk menghindari lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah.

Menurut peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara/daerah, memeriksa keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan organisasi/ mengamankan aset, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memelihara catatan serta dokumen secara lebih rinci dan akurat. SPIP ini sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya SPIP maka organisasi akan terhindar dari berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan dapat diminimalisir sehingga aset organisasi dapat dilindungi dengan baik. Sistem pengendalian intern yang baik akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur pencatatan transaksi melalui proses jurnalisasi, menetapkan format buku jurnal, buku besar, buku pembantu serta menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah (Halim & Syam, 2013). Sistem akuntansi ini berpedoman pada peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah tidak boleh menyimpang dari SAP. SAKD merupakan prosedur yang saling terhubung yang disusun sesuai dengan suatu skema menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Sistem akuntansi pemerintah berbeda dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, karena standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar PABU demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sistem akuntansi pemerintah diartikan sebagai prosedur secara manual atau terkomputerisasi dalam melakukan pengumpulan, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan keuangan instansi pemerintahan (Pradita, 2010).

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai hasil kinerja individu yang efisien dan efektif (Yaswat, 2015). Sumber daya manusia adalah komponen penting dalam suatu organisasi yang mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Nurillah, 2014). Kapasitas ini dilihat dari segi kemampuan untuk mencapai kinerja yang menghasilkan keluaran (*output*) dan *outcomes*. Kapasitas sumber daya manusia dapat dinilai dari tanggung jawab terhadap tugasnya yang dilaksanakan sesuai posisinya. Sedangkan untuk kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman individu. Kompetensi merupakan keterampilan individu, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan pekerjaannya. Individu yang tidak memiliki kemampuan yang kompeten tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, yang dapat

mengakibatkan pemborosan waktu maupun tenaga. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi maka untuk mencapai tujuan akan lebih mudah untuk direalisasikan. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh dari sumber asli responden tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari jawaban responden dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel dependen dan independen. Adapun penjelasannya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan (Halim & Syam, 2013).	a. Transparansi b. Kejujuran c. Akuntabilitas d. <i>Value for money</i> e. Pengendalian	Skala <i>likert</i>
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2011).	a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian resiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pengawasan pengendalian intern	Skala <i>likert</i>
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu	a. Sistem pencatatan b. Dasar akuntansi	Skala <i>likert</i>

(X ₂)	skema yang menyeluruh ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi.	c. Siklus akuntansi	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃)	kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Nurillah, 2014).	a. Pengetahuan b. Keterampilan individu c. Kemampuan	Skala <i>likert</i>

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bendahara dan staff bendahara organisasi perangkat daerah. Sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian populasi yang diteliti (Sugiyono, 2010). Sampel dalam penelitian ini yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi di bagian keuangan atau akuntansi pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Jepara. Sampel dalam penelitian ini digunakan sebanyak 41 OPD, dengan total responden setiap OPD dipilih 2 orang. Jadi total keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 82 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara *simple random sampling* (acak). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan survei kuesioner. Kuesioner ini akan diserahkan langsung kepada responden atau diberikan kepada salah satu pegawai pada masing-masing Dinas atau Instansi untuk bisa mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dengan menggunakan skala pengukuran *likert*. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan dalam model regresi berganda ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = efektivitas pengelolaan keuangan daerah
 a = konstanta
 β_1 = koefisien regresi sistem pengendalian intern pemerintah
 β_2 = koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah
 β_3 = koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia
 X₁ = variabel sistem pengendalian intern pemerintah
 X₂ = variabel sistem akuntansi keuangan daerah
 X₃ = variabel kompetensi sumber daya manusia
 e = error

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPIP	80	50,00	75,00	60,9125	5,09702
SAKD	80	32,00	50,00	41,1250	4,28827
Kompetensi SDM	80	24,00	40,00	32,9625	3,30494
Efektivitas					
Pengelolaan	80	26,00	40,00	33,1375	3,17324
Keuangan Daerah					
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Dapat dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden (N) ada 80, dari 80 jawaban responden ini variabel SPIP (X_1) nilai terkecil (Minimum) adalah 50, nilai terbesar (Maximum) adalah 75, dengan rata-rata 60,91 dan standar deviasi sebesar 5,09. Hasil dari variabel SAKD (X_2) menunjukkan bahwa nilai minimum 32, nilai maksimum 50, dengan rata-rata 41,12 dan standar deviasi sebesar 4,28. Sedangkan variabel Kompetensi SDM (X_3) menunjukkan nilai minimum 24, nilai maksimum 40, rata-rata 32,96 dan standar deviasi sebesar 3,30. Untuk variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 40, rata-rata 33,13 dan standar deviasi sebesar 3,17.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan kuesioner tersebut. Terdapat 41 pertanyaan dalam penelitian yang harus dijawab oleh responden. Digunakan nilai tingkat kepercayaan $\alpha=5\%$ ($\alpha=0,05$). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada penelitian yang dilakukan ini jumlah sampel (n)= 80 dan besarnya df = 80-2= 78 dengan $\alpha=0,05$ didapat $r_{tabel} = 0,2199$. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan bernilai positif maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016). Hasil analisis uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
SPIP (X1)	X1.1	0,429	0,2199	Valid
	X1.2	0,423	0,2199	Valid
	X1.3	0,303	0,2199	Valid
	X1.4	0,582	0,2199	Valid
	X1.5	0,535	0,2199	Valid
	X1.6	0,500	0,2199	Valid
	X1.7	0,621	0,2199	Valid
	X1.8	0,593	0,2199	Valid
	X1.9	0,436	0,2199	Valid
	X1.1	0,559	0,2199	Valid
	0	0,672	0,2199	Valid
	X1.1	0,519	0,2199	Valid
	1	0,413	0,2199	Valid
	X1.1	0,369	0,2199	Valid
	2	0,506	0,2199	Valid
	X1.1			

	3			
	X1.1			
	4			
	X1.1			
	5			
SAKD (X2)	X2.1	0,421	0,2199	Valid
	X2.2	0,644	0,2199	Valid
	X2.3	0,638	0,2199	Valid
	X2.4	0,750	0,2199	Valid
	X2.5	0,568	0,2199	Valid
	X2.6	0,474	0,2199	Valid
	X2.7	0,686	0,2199	Valid
	X2.8	0,597	0,2199	Valid
	X2.9	0,488	0,2199	Valid
	X2.1	0,436	0,2199	Valid
	0			
Kompetensi SDM (X3)	X3.1	0,740	0,2199	Valid
	X3.2	0,478	0,2199	Valid
	X3.3	0,672	0,2199	Valid
	X3.4	0,672	0,2199	Valid
	X3.5	0,668	0,2199	Valid
	X3.6	0,695	0,2199	Valid
	X3.7	0,475	0,2199	Valid
	X3.8	0,521	0,2199	Valid
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,526	0,2199	Valid
	Y2	0,491	0,2199	Valid
	Y3	0,528	0,2199	Valid
	Y4	0,700	0,2199	Valid
	Y5	0,592	0,2199	Valid
	Y6	0,439	0,2199	Valid
	Y7	0,558	0,2199	Valid
	Y8	0,420	0,2199	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan penelitian yang digunakan memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu 0.2199. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dapat dikatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai analisis dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Hasil analisis dari uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

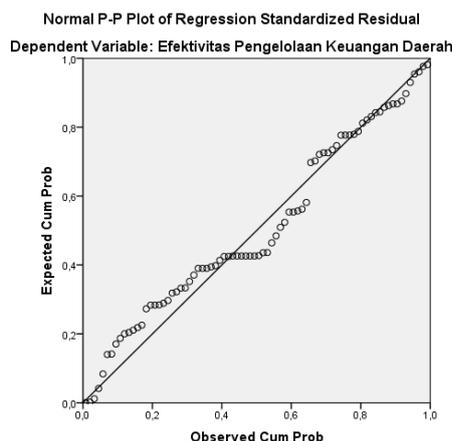
Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Standar	Keterangan
SPIP (X1)	0.851	0.60	Reliabel
SAKD (X2)	0.852	0.60	Reliabel
Kompetensi SDM (X3)	0.860	0.60	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.808	0.60	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

**Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot**

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Dengan melihat tampilan grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Statistik

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov test*. Jika nilai signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi yang dihasilkan > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut tabel hasil dari uji normalitas *kolmogorov-smirnov* dari penelitian ini :

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83016096
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		.919
Asymp. Sig. (2-tailed)		.366

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *test statistic kolmogorov-smirnov* adalah 0,103 dan nilai signifikansi 0,366 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal. Dengan demikian model regresi layak digunakan untuk penelitian.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	,323	2,772		,116	,908		
SPIP	,180	,049	,289	3,645	,000	,694	1,441
SAKD	,172	,063	,232	2,716	,008	,597	1,674
Kompetensi SDM	,448	,079	,466	5,702	,000	,654	1,529

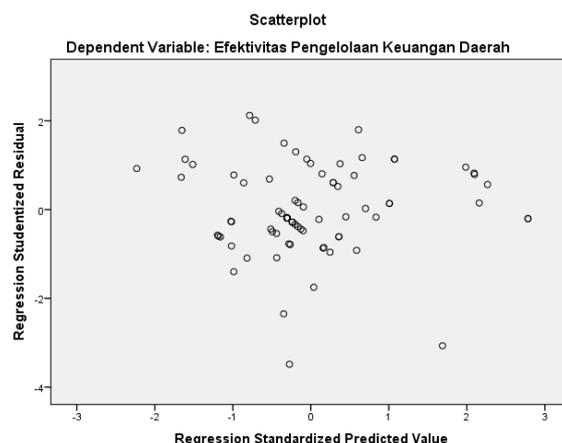
a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Hasil perhitungan dari nilai VIF juga menunjukkan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 3. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Dari grafik scatterplots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

Uji Glejser

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai *absolute* residual. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute* residual $\geq 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,749	2,775		-,270	,788
	SPIP	,002	,049	,006	,044	,965
	SAKD	-,045	,063	-,105	-,706	,483
	Kompetensi SDM	,075	,079	,135	,950	,345

a. Dependent Variable: ABSUT

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan Uji Glejser pada tabel diatas diperoleh hasil nilai signifikan dari variabel independen SPIP sebesar $0,965 > 0,05$. Variabel independen SAKD memiliki nilai signifikan sebesar $0,483 > 0,05$. Dan variabel independen Kompetensi SDM memiliki nilai signifikan sebesar $0,345 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen menunjukkan tidak ada satupun yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut Ut dan dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya. Berikut disajikan hasil dari uji autokorelasi dalam penelitian ini :

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,817 ^a	,667	,654	1,86593	1,774

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, SPIP, SAKD

b. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai DW sebesar 1,774 nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel dalam penelitian 80 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3). Oleh karena nilai DW 1,774 lebih besar dari batas atas (du) 1,72 dan kurang dari 4 – 1,72 = 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel SPIP, kompetensi SDM, dan SAKD terhadap variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil perhitungan dari analisis regresi berganda disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9. Hasil Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,323	2,772		,116	,908
	SPIP	,180	,049	,289	3,645	,000
	SAKD	,172	,063	,232	2,716	,008
	Kompetensi SDM	,448	,079	,466	5,702	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,323 + 0,180X_1 + 0,172X_2 + 0,448X_3 + e$$

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil dari analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada *output* SPSS tabel *summary* berikut ini :

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,817 ^a	,667	,654	1,86593

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, SPIP, SAKD

b. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,654, dalam hal ini berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari SPIP, kompetensi SDM, SAKD dapat menjelaskan variabel dependen efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan nilai sebesar 65,4% sedangkan sisanya 34,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Selanjutnya dilakukan uji statistik F. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hasil *output* SPSS uji F akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	530,878	3	176,959	50,825	,000 ^b
	Residual	264,610	76	3,482		
	Total	795,488	79			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, SPIP, SAKD

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 50,825 dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,72. Jadi nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} yaitu $50,825 > 2,72$ dan untuk nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa SPIP, SAKD, dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh masing-masing variabel SPIP, kompetensi SDM, dan SAKD terhadap variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil *output* SPSS perhitungan thitung ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 12. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized		Standardized			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,323	2,772			,116	,908
	SPIP	,180	,049	,289		3,645	,000
	SAKD	,172	,063	,232		2,716	,008
	Kompetensi SDM	,448	,079	,466		5,702	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi 0,289. Bisa dilihat juga pada hasil pengujian statistik t yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} (3,645) > t_{tabel} (1,9917)$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

SPIP merupakan suatu sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang mencakup segala aspek organisasi dan dapat menyeimbangkan bagian organisasi maupun kepentingan yang ada dalam organisasi. Efektivitas secara umum diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dengan adanya pengendalian intern pemerintah maka seluruh proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Utami, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Injilita (2017) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi 0,232. Bisa dilihat juga pada hasil pengujian statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (2,716) > t_{tabel} (1,9917)$ dengan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

SAKD merupakan prosedur saling berhubungan yang disusun sesuai skema yang menyeluruh untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam struktur pemerintah instansi yaitu entitas yang wajib melakukan pencatatan transaksi dan melakukan pelaporan. Penerapan SAKD berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dikarenakan SAKD memiliki hasil akhir yang berupa informasi keuangan. Semakin baik penerapan SAKD maka akan semakin baik pula informasi keuangan yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah termasuk

aturan, kebijakan dan pengembangan SAKD yang terarah dan sistematis (Simatupang, 2017). Dengan diterapkannya SAKD diharapkan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif dan efisien sehingga pemerintah dapat melaksanakan pertanggungjawaban pada masyarakat secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Simatupang, 2017). yang menyatakan bahwa SAKD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi 0,466. Didukung dengan hasil pengujian statistik t yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (5,702) > t_{tabel} (1,9917) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan organisasi karena yang menjalankan serta mengelola organisasi adalah manusia. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang kompeten sesuai dengan bidangnya agar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Menurut Simatupang (2017) agar dapat mengelola keuangan daerah dengan baik harus didukung oleh SDM yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan. SDM merupakan roda penggerak dalam organisasi agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. SDM harus selalu mampu beradaptasi dengan reformasi-reformasi yang sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kemampuan dari organisasi tergantung pada kemampuan individu yang ada dalam organisasi. Apabila pemerintahan memiliki SDM pengelola keuangan yang berkompeten maka pengelolaan keuangan akan berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Sari, Wiyanti, & Masitoh (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara simultan variabel SPIP, SAKD, dan Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari uji statistik F yang menunjukkan nilai F_{hitung} (50,825) > F_{tabel} (2,72) dan untuk nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Didukung dengan kuatnya pengendalian intern pemerintah, kualitas SDM yang kompeten dengan menghasilkan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan penerapan SAKD yang memudahkan dalam mengelola keuangan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan tercapai. Jika efektivitas pengelolaan keuangan sudah tercapai maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan berjalan sesuai dengan rencana yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tercapainya efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan menghasilkan informasi keuangan yang lengkap, akurat dan dapat menyajikan laporan keuangan daerah yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simatupang, (2017) yang menyatakan bahwa SPIP, kompetensi SDM, dan SAKD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji Koefisien Determinasi, dapat diketahui nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,654, dalam hal ini berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari SPIP, SAKD, dan Kompetensi SDM dapat menjelaskan variabel dependen efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan nilai sebesar 65,4% sedangkan sisanya 34,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. SPIP berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai signifikansi variabel SPIP sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = \text{alpha}$) menunjukkan bahwa SPIP mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji secara parsial memiliki nilai thitung (3,645) > ttabel (1,9917) maka H_{a1} diterima. SAKD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai signifikansi variabel SAKD sebesar $0,008 < 0,05$ ($\alpha = \text{alpha}$) menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji secara parsial memiliki nilai thitung (2,716) > ttabel (1,9917) maka H_{a2} diterima. Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai signifikansi variabel Kompetensi SDM sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = \text{alpha}$) menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji secara parsial memiliki nilai thitung (5,702) > ttabel (1,9917) maka H_{a3} diterima. SPIP, SAKD, dan Kompetensi SDM berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dibuktikan dengan hasil uji statistik F dengan nilai Ftabel yaitu $50,825 > 2,72$ dan untuk nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Dapat disimpulkan bahwa SPIP, SAKD, dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran yang dapat diberikan yaitu bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas obyek penelitian dan memperbanyak jumlah responden agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor lain yang mempengaruhi terwujudnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti kinerja pegawai, pengawasan fungsional, dan variabel lainnya yang dapat mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulan, S. G., Tinangon, J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1).
- Halim, A., & Syam, K. M. (2013). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Injilita, S. G. (2017). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA. *JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN*.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan TI, dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Pradita, G. (2010). *Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah*. Universitas Widyatama.

- Sari, D. B., Wiyanti, A., & Masitoh, E. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional IENACO*, 795–801.
- Simatupang, M. S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon*, 4(1).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Tanzerina, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating Studi Pada SKPD Kabupaten Indragiri. *JOM Fekon*, 4(1), 586–600.
- Utami, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat, Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon*, 3(1), 910–922.
- Wijaya, F. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. *Universitas Lampung*.
- Yaswat, L. (2015). Pengaruh Kompetensi SDM, SPIP, dan Penerapan SAKD Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2(*Jom FEKON*), 1(4).